

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2020)

The Effect Of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, And Balance Funds On Local Government Financial Performance (Study On Provinces In Indonesia In 2020)

Aprillia Maramis¹, Sri Rahayu²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, Aprilliamaramis@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, Srirahayu@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Kinerja keuangan yang menjadi salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah, untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah memberikan kontribusi dalam pencapaian target sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun secara parsial, studi kasus pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposivesampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana dan berganda dengan menggunakan *software* SPSS versin25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dana alokasi umum dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan kemandirian. Sedangkan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan efektivitas dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan kemandirian, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan kemandirian.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan.

Abstrack

Financial performance is one of the benchmarks of the ability of the region in exploring the potential possessed in each region to contribute to regional revenue growth. Regional revenue growth contributes to the achievement of predetermined targets as appropriate so as to have an influence on financial performance. This study aims to find out the influence of local revenues, general allocation funds, and balance funds on the financial performance of local governments both simultaneously and partially, case studies on provincial local governments in Indonesia in 2020 semester 1. This research uses quantitative methods. The sampling technique used is purposive sampling. The data analysis method used is simple and multiple linear regression using SPSS software version 25. The results of the study indicate that the general allocation fund and the balancing fund simultaneously have an effect on financial performance which is proxied by independence. While partially local revenue has an effect on financial performance as proxied by effectiveness and general allocation funds affect financial performance as proxied by independence, while balancing funds have no effect on financial performance as proxied by independence.

Keywords: *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Balance Fund, Financial Performance.*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undangn No 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri seluruh urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, mengatur seluruh pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh[6]. Kewenangan pengelolaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan otonomi daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2004, pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu sistem sentralisasi berubah menjadi sistemn desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan otonomi yang diberikan daerah dapt mengolah keuangan secara mandiri untuk dapat merealisasikan proses pembangunan yang dilakukan tanpa

bergantung dengan pemerintah pusat, dimana keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat diukur dengan kinerja keuangan[8].

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah yang dapat diukur dengan seberapa besar kemampuan daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah[9]. Kinerja keuangan pada Provinsi di Indonesia tahun 2019-2020 rata-rata mengalami penurunan dimana terdapat 76% dari 34 provinsi di Indonesia mengalami penurunan dan 24% dari 34 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan jika dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020[3]. Penurunan yang terjadi sebesar 76% dari 34 provinsi di Indonesia disebabkan oleh adanya pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia tidak dapat mencapai target sehingga penurunan yang terjadi berpengaruh dan memberikan dampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan ketidaksesuaian atau hasil penelitian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi dasar pemikiran dari penelitian ini. Penelitian ini peneliti menggunakan tiga faktor yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Perimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia tahun 2020 semester I baik secara simultan maupun secara parsial.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Berdasarkan Teori

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber pendapatan asli daerah, serta bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk dapat menggali dan memanfaatkan potensi – potensi yang dimiliki daerah[7]. Kebebasan suatu daerah dalam menggali potensi yang dimiliki untuk dapat menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, dimana pendapatan asli daerah mampu memberikan kontribusi baik terhadap pertumbuhan pendapatan, agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat sehingga dapat mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat[1]. Pendapatan Asli Daerah berperan sangat penting, dimana pendapatan asli daerah yang diperoleh langsung dari potensi asli daerah. Sebagai sumber utama pendapatan maka Pendapatan Asli Daerah yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah[2]. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah, yaitu semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dimana dialokasikan dengan tujuan untuk memberikan pemerataan kemampuan antar daerah dan membantu menandai kebutuhan pada masing – masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi[5]. Dana Alokasi Umum yang diserahkan secara penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga dapat dialokasikan dan di gunakan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian semakin rendah transfer dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan memperlihatkan bahwa daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan daerahnya secara mandiri sehingga tidak bergantung dengan pemerintah pusat, maka akan membuat kinerja keuangan pemerintah meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

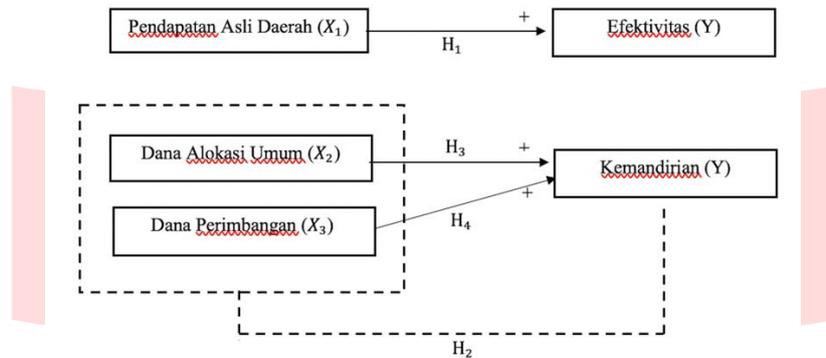
3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk menandai kebutuhan pada masing – masing daerah. Tujuan dialokasikannya Dana Perimbangan untuk dapat mengupayakan pemerataan pembangunan pada masing – masing daerah dan sebagai upaya dalam mengefisienkan biaya otonomi daerah. Pemberian dan perimbangan agar dapat melaksanakan

pembangunan daerah agar desentralisasi dapat tercapai. Dengan demikian apabila pembagian dana perimbangan mampu di kelola dengan baik dan mengalkokasikan keuangan yang di berikan pemerintah pusat dengan maksimal, maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- >** : Pengaruh Parsial
- - - - ->** : Pengaruh Simultan

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi yang terdaftar di Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* diperoleh 31 provinsi yang digunakan dengan periode penelitian pada tahun 2020 semester 1. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan studi perpustakaan. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari *website* resmi DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dan regresi berganda dengan menggunakan *Software SPSS* versi 25. Persamaan analisis regresi sederhana dan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Analisis Regresi Sederhana

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan Efektivitas
- α = konstanta
- β = koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah
- X = Pendapatan Asli Daerah

2. Analisis Regresi Berganda

$$Y = \alpha + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan Kemandirian
- α = Konstant
- β_2 = Koefisien regresi Dana Alokasi Umum
- β_3 = Koefisien regresi Dana Perimbangan
- X_2 = Dana Alokasi Umum
- X_3 = Dana Perimbangan

C. Pembahasan

D. Analisis Statistik Deskriptif

Table 3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	31	53,076,596,752	8,926,442,780,993	1,636,095,164,084	2,232,874,170,310
DAU	31	123,827,917,000	2,213,436,749,000	925,260,331,266	424,310,836,965
DP	31	597,419,713,850	7,330,351,940,707	1,665,545,109,816	1,286,922,003,486
Efektivitas	31	0.10308	0.65572	0.3855391	0.09744548
Kemandirian	31	0.04982	2.89319	0.8071546	0.60575222

Sumber : Output SPSS 25.

Nilai rata – rata (mean) Pendapatan Asli Daerah pada 31 provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1 sebesar Rp 1,636,095,164,084. Nilai maksimum sebesar Rp 8,926,442,780,993 yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar Rp 53,076,596,752 yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2,232,874,170,310.

Nilai rata – rata (mean) Dana Alokasi Umum pada 31 provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1 sebesar Rp 925,260,331,266. Nilai maksimum sebesar Rp 2,213,436,749,000 yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar Rp 123,827,917,000 yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp 424,310,836,965.

Nilai rata – rata (mean) Dana Perimbangan pada 31 provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1 sebesar Rp 1,665,545,109,816. Nilai maksimum sebesar Rp 7,330,351,940,707 yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat. Sedangkan nilai minimum yaitu Rp 597,419,713,850 yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi Dana Perimbangan sebesar Rp 1,286,922,003,486.

Nilai rata – rata (mean) Kinerja Keuangan yang di proksikan dengan efektivitas pada 31 provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1 sebesar 0,3855391. Nilai maksimum sebesar 0,65572 yang dimiliki oleh Provinsi Papua, sedangkan nilai minimum yaitu sebesar 0,10308 yaitu dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada kinerja keuangan yang diproksikan dengan efektivitas sebesar 0,09744548.

Nilai rata-rata (mean) Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan kemandirian pada 31 provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1 sebesar 0,8071546. Nilai maksimum sebesar 2,89319 yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar 0.04982 yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada kinerja keuangan yang diproksikan dengan kemandirian sebesar 0.60575222.

E. Hasil Uji Asumsi Klasik.

1. Uji Normalitas

Tabel 3.2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
N		31	31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000	0.0000000
	Std. Deviation	0.08769436	0.47833715
Most Extreme Differences	Absolute	0.151	0.115
	Positive	0.151	0.115

Negative	-0.118	-0.084
Test Statistic	0.151	0.115
Asymp. Sig. (2-tailed)	.071 ^c	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja keuangan yang diprosikan dengan efektivitas sebesar 0.071 dan nilai Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan kemandirian sebesar 200. berdasarkan hasil data tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas $>0,05$.

2. Uji Heteroskedastisitas.

Tabel 3.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas Pendapatan Asli Daerah

Coefficients^a

Model	Sig.
1 (Constant)	0,000
PAD	0,812

a. Dependent Variable: res_abs

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 3.3 hasil uji heteroskedastisitas dari pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikan 0,812. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan $>0,05$. Sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 3.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas DAU dan DP

Coefficients^a

Model	Sig.
1 (Constant)	0.328
Dana Alokasi Umum	0.797
Dana Perimbangan	0.793

a. Dependent Variable: res_abs

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 3.4 hasil uji heteroskedastisitas dari Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikan sebesar 0,797 dan Dana Perimbangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,793. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan $> 0,05$. Sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

3. Uji Multikolonieritas.

Tabel 3.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0.031	0.975		
	Dana Alokasi Umum	3.500	0.002	0.534	1.872
	Dana Perimbangan	-0.813	0.423	0.534	1.872

a. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber : Output SPSS 25.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa nilai tolerance Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan sebesar 0,534. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai $> 0,010$ dan nilai VIF Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan sebesar 1,872. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai < 10 maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

C. Analisis Regresi Linear Sederhana.

Berikut merupakan hasil persamaan model regresi linear sederhana dalam penelitian ini:

$$Y = 0,354 + 1,903PAD$$

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 0,354, yang berarti apabila Pendapatan Asli Daerah bernilai tetap, maka nilai Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan efektivitas adalah 0,354. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,903 yang mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan Pendapatan Asli Daerah, maka Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan efektivitas mengalami kenaikan sebesar 1,903.

D. Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut merupakan hasil persamaan model regresi linear sederhana dalam penelitian ini:

$$Y = -0,007 + 1,020DAU - 7,813DP$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat nilai konstanta sebesar -0,007, yang berarti apabila Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan bernilai 0 atau tetap, maka nilai kinerja keuangan yang diprosikan dengan kemandirian sebesar -0,007. Nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 1,020 yang mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan Dana Alokasi Umum, maka Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan kemandiria mengalami kenaikan sebesar 1,020. Nilai koefisien Dana Perimbangan sebesar -7,813 yang megandung arti bahwa setiap penurunan satu satuan Dana Perimbangan, maka Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan kemandirian mengalami kenaikan sebesar -7,813.

E. Koefisien Determinasi

Tabel 3.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
<hr/>				

1	.436 ^a	0.190	0.162	0.08919351
2	.614 ^a	0.376	0.332	0.49512599

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan

b. Dependent Variable: Efektivitas, Kemandirian

Sumber : Output SPSS 25.

Berdasarkan tabel 3.6 di atas diketahui koefisien determinasi pertama Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan efektivitas dilihat dari nilai R sebesar 0,436 yang artinya hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan efektivitas dikatakan kategori sedang. Nilai R Square Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan efektivitas sebesar 0,190. Artinya 19% variasi dari variabel dependen Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan efektivitas dipengaruhi variabel independent Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 81% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Kedua diketahui koefisien determinasi Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan kemandirian, dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,332. Artinya 33,2% variasi dari variabel dependen kinerja keuangan yang diprosikan dengan kemandirian. Sedangkan 66,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

F. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3.7
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.144	2	2.072	8.452	.001 ^b
	Residual	6.864	28	0.245		
	Total	11.008	30			

a. Dependent Variable: Kemandirian

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum

Sumber : Output SPSS 25.

Berdasarkan tabel 3.7 nilai signifikan yaitu sebesar 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

G. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3.8
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0.354	0.020		17.742	0.000
	Pendapatan Asli Daerah	1.903E-14	0.000	0.436	2.609	0.014

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber : Output SPSS 25.

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan efektivitas

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,014. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan efektivitas, artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayu,2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tabel 3.9
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-0.007	0.218		-0.031	0.975
Dana Alokasi Umum	1.020	0.000	0.715	3.500	0.002
Dana Perimbangan	-7.813	0.000	-0.166	-0.813	0.423

a. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber : Output SPSS 25

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan kemandirian

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,002. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan kemandirian, artinya masih terdapat pemerintah daerah yang menerima transfer dana dari pemerintah pusat, namun kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Angelina,Efni, & Rasulia,2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan kemandirian

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,423. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan kemandirian, artinya masih terdapat pemerintah daerah yang menerima transfer dana tetapi kinerja keuangan mengalami penurunan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh(Sari,2020) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja keuangan yang diprosikan dengan kemandirian. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diprosikan dengan efektivitas, Dana Alokasi Umum juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang di prksikan dengan kemandirian, sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang di proksikan dengan kemandirian.

REFERENSI

- [1]Antari, N. P., & Sadana, I. P. (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 7, No. 2, 2018: 1080-1110 ISSN : 2302-8912, 7, 1080-1110.*
- [2]Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri ISSN: 2541-0180 Vol. 3 No. 1, Maret 2018, 3, 80-96.*
- [3]Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020.*
- [4]Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 1 EISSN 2548-3501, 2, 17-32.*
- [5]Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan.*
- [6]Republik, I. (2004). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinah Daerah.*
- [7]Republik, I. (2004). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- [8]Republik, I. (2004). *Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- [9]Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ecodemica, Vol. 4 No. 2 September 2020, 4, 179-184.*